

APLIKASI KERANGKA KERJA SAMA AIFS (ASEAN Integrated Food Security) dan SPA-FS (Framework and Strategic Plan of Action on ASEAN Food Security) TAHUN 2009-2013 OLEH INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DOMESTIK TAHUN 2015-2020

Ratri Ayu Dewi

20110510080

(ratriayudewi31@gmail.com)

Prodi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract

This scientific work is the result of a review of the study of International Relations ie regional food security issues. Food Security is a highly sensitive issue, especially in the ASEAN region. ASEAN member countries are very well known as the largest producer of rice such as Vietnam, Thailand, and Indonesia will have problems because of climatic factors. Climate giving major influence on food crops thereby affecting food production every country. Indonesia, the ASEAN member countries, in the production of foodstuffs is also not always optimal because of the weather which hampers. Thus the leaders of ASEAN member countries agreed to hold a meeting to discuss the regional food security. Results of the meeting of the leaders of these countries agreed on the establishment of Cooperation Framework AIFS SPA-FS is a framework of cooperation that addresses the problem of food in ASEAN in which there are several programs to be implemented and achieved for the countries involved in the manufacture of the cooperation framework.

Abstrak

Karya ilmiah ini merupakan hasil penelaahan kajian Ilmu Hubungan Internasional yaitu permasalahan ketahanan pangan regional. Ketahanan Pangan merupakan isu yang sangat sensitif khususnya di kawasan ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN yang sangat terkenal sebagai produsen terbesar beras seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia akan mengalami hambatan karena faktor iklim. Iklim memberi pengaruh

besar terhadap tanaman pangan sehingga mempengaruhi hasil produksi pangan setiap negara. Indonesia yang merupakan negara anggota ASEAN, dalam produksi bahan pangan nya juga tidak selalu maksimal karena faktor cuaca yang menghambat. Maka dari itu para pemimpin negara di anggota ASEAN sepakat mengadakan pertemuan guna membahas mengenai ketahanan pangan regional. Hasil dari pertemuan para pemimpin negara tersebut menyepakati terbentuknya Kerangka Kerja Sama AIFS SPA-FS yaitu kerangka kerjasama yang membahas mengenai masalah pangan di ASEAN yang di dalamnya terdapat beberapa program kerja untuk dilaksanakan dan dicapai bagi negara-negara yang terlibat dalam pembuatan kerangka kerjasama tersebut.

Isu mengenai ketahanan pangan merupakan isu yang sangat sensitif, dimana dari isu tersebut dapat mempengaruhi hubungan antar Negara khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap manusia. Keadaan seperti ini dapat dipicu diantaranya dengan kondisi alam yang dapat setiap waktu mengalami perubahan iklim global baik itu ekstrim maupun tidak. Tidak hanya kondisi perubahan iklim saja yang dapat berpengaruh terhadap hubungan antar Negara, namun dengan adanya laju pertumbuhan penduduk dunia yang terus meningkat di setiap tahunnya yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah kebutuhan pangan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara produktifitas pangan dengan jumlah kebutuhan atau permintaan yang terus meningkat.

Dalam konteks lingkup regional ASEAN, dari beberapa Negara-negara anggotanya sebagian besar masyarakat nya mengkonsumsi jenis makanan pokok yaitu berupa beras. Di ASEAN sendiri terdapat beberapa Negara yang terkenal sebagai produsen utama penghasil beras, diantaranya seperti Thailand, Vietnam dan Indonesia. Dalam kondisi lingkungan alam yang stabil, kemampuan setiap Negara dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik cenderung mengalami surplus sehingga arus perdagangan bahan pangan antar Negara akan lancar. Negara-negara pemasok utama bahan pokok seperti Thailand dan Vietnam yang sering dilanda bencana alam berupa banjir, akan memberikan dampak pada penurunan produktifitas bahan pangan. Maka dari itu, Negara-negara pemasok bahan pokok tersebut akan lebih mengutamakan kebutuhan pokok dalam negeri. Kebijakan seperti itu akan menghambat kelancaran arus perdagangan bahan pangan antar Negara, sehingga akan menimbulkan ketegangan hubungan antar negara regional ASEAN.

Diantara negara anggota ASEAN lainnya, Indonesia dikenal sebagai satu-satunya negara anggota ASEAN yang memiliki cakupan wilayah yang paling luas dibandingkan dengan negara anggota lain. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memanjang dari Aceh hingga Papua. Dewasa ini dengan penduduk sebanyak 216 juta mungkin Indonesia tetap akan menjadi negara terbesar dibanding negara-negara anggota lain baik negara pendiri maupun

negara-negara anggota baru sebagai hasil dari perluasan ASEAN.¹ Sekalipun penduduknya berjumlah banyak Indonesia memiliki perbedaan suku, bahasa, budaya, dan agama di kalangan penduduknya.

Konsumsi pangan masyarakat Indonesia yang sangat dominan dengan beras merupakan pemicu masalah dari berbagai aspek yang akan timbul di kemudian hari yakni menurunnya harga jual jenis pangan yang lain, masalah kesehatan dan lain-lain. Selain itu lahan untuk menanam padi semakin berkurang seiring dengan era pembangunan saat ini. Kebutuhan beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia perlu diubah dengan cara mengenalkan dan menyarankan masyarakat untuk mengkonsumsi selain beras seperti jagung, umbi-umbian, singkong dan biji-bijian. Pemanfaatan keanekaragaman jenis pangan di Indonesia dapat dijadikan solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras selain itu juga untuk memperbaiki gizi masyarakat dan dapat menjadi jembatan menuju kemandirian pangan nasional.

Kerawanan pangan masih meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia kecuali sebagian besar di Jawa dan Sumatera. Menurut *World Food Programme (WFP)* tahun 2009, wilayah yang masih timpang antara jumlah produksi bahan pangan pokok terhadap jumlah konsumsi terjadi pada sebagian besar wilayah Papua, Papua Barat, sebagian Sulawesi, sebagian kecil Kalimantan dan Sumatera serta bagian yang sangat kecil di pulau Jawa. Kerentanan pangan ini disebabkan berbagai faktor, bukan hanya ketersediaan tetapi juga daya beli masyarakat.

Meskipun mengalami kemajuan yang patut dicatat prestasinya, pembangunan Indonesia masih belum mencukupi. Ketahanan pangan dan kecukupan nutrisi belum terlaksana dengan baik sehingga masih sangat perlu ditingkatkan dan masih tetap menjadi permasalahan yang harus dihadapi pemerintah, khususnya untuk provinsi-provinsi di wilayah Indonesia bagian timur di mana indikator-indikator pembangunan masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Menurut *World Food Program (2013)* sebanyak 13% dari jumlah penduduk Indonesia yaitu sekitar 31 juta orang, masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pada saat yang sama, Indonesia merupakan negara yang paling rentan terhadap bencana alam dan perubahan iklim, hal ini ditengarai sebagai ancaman utama terhadap ketahanan pangan. Indonesia terus berlanjut menghadapi dampak bencana yang besar seperti gempa, tsunami dan erupsi gunung berapi. Untuk itu perlunya antisipasi jika terjadi bencana, kekeringan, banjir dan longsor sehingga dampaknya tidak menghambat ketahanan pangan nasional.

Sebagai suatu rezim ketahanan pangan AIFS regional di ASEAN, AIFS dibentuk karena adanya masalah pangan negara-negara anggota ASEAN dimana diketahui masalah pangan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks dan

¹ Anthony L. Smith, "Indonesia: Transforming the Leviathan," dalam John Funston (ed), *Government and Politics in Southeast Asia*, Singapura : ISEAS, 2001, hal.81.

dapat mempengaruhi hubungan antar negara, sehingga para pemimpin negara bersepakat membentuk suatu kerja sama regional *ASEAN Integrated Food Security* (AIFS) tersebut. Dimana di dalam AIFS tersebut berisi mengenai beberapa kerangka kerja sama yang dibentuk oleh negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama yaitu mengenai masalah pangan. Sebagai suatu rezim, AIFS membentuk suatu kerangka kerja sama yaitu SPA-FS atau (*Framework Strategic Plan of Action on ASEAN Food Security*) yaitu rencana aksi ketahanan pangan. Rezim AIFS tersebut merupakan suatu organisasi antar pemerintah atau *Intergovernmental Organizations* (IGOs) yang memiliki fungsi dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang ada antar pemerintah maupun antar bangsa.

Sejalan dengan dinamika pemantapan ketahanan pangan dilaksanakan dengan mengembangkan sumber-sumber bahan pangan, kelembagaan pangan dan budaya pangan yang dimiliki pada masyarakat masing-masing wilayah. Keunggulan dari pendekatan ini antara lain adalah bahwa bahan pangan yang diproduksi secara lokal telah sesuai dengan sumberdaya pertanian dan iklim setempat, sehingga ketersediaannya dapat diupayakan secara berkesinambungan. Dengan kemampuan lokal tersebut maka ketahanan pangan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh masalah atau gejolak pasokan pangan yang terjadi di luar wilayah atau luar negeri.

Pada dasarnya konsep ketahanan pangan dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis di bidang pangan, utamanya bagi golongan rawan pangan sementara maupun rawan pangan kronis yang masih mempunyai potensi pengembangan aktivitas ekonominya. Agribisnis pangan melibatkan banyak pelaku, usaha kecil seperti petani, pengolah dan pedagang yang berbasis pada keunggulan komparatif dan kompetitif sumberdaya local.

Keamanan pangan merupakan aspek penting dari kerja sama ASEAN di bidang pangan dan pertanian di bawah program integrasi ekonomi ASEAN. Selama bertahun-tahun, ASEAN telah melakukan upaya terpadu untuk meningkatkan sistem kontrol pangan dan prosedur untuk memastikan pergerakan pangan yang aman, sehat, dan berkualitas yang lebih bebas di kawasan ini. Mengingat hal itu juga termasuk hal penting bahwa makanan dan produk pertanian ASEAN memenuhi standar yang diakui secara internasional untuk meningkatkan daya saing ASEAN di pasar internasional, maka ASEAN memberikan fokus pada harmonisasi mutu dan standar, jaminan keamanan pangan, serta standarisasi sertifikat perdagangan untuk pangan dan produk pertanian.

Pada tanggal 5-7 Agustus 2008 para menteri ASEAN mengadakan pertemuan membahas tentang Pertanian dan Kehutanan di Chiang Mai, pada pertemuan tersebut juga membahas mengenai kerangka kerjasama *ASEAN Integrated Food Security* (AIFS). Pada pertemuan tersebut fokus bahasan terletak pada masalah penekanan ketahanan pangan serta penanganannya yang dilakukan dengan cara mensosialisasikan pemahaman umum bagi Negara-negara anggota ASEAN serta

pembangunan jangka panjang yang terfokus pada produksi pertanian yang berkelanjutan dan perdagangan. Aplikasi dari kerangka kerjasama *ASEAN Integrated Food Security (AIFS)* didukung juga oleh Kerangka Strategis Rencana Aksi Ketahanan Pangan atau *Strategic Plan of Action on Food Security (SPA-FS)*, dengan periode selama lima tahun mulai dari tahun 2009-2013.

Tujuan dari Kerangka AIFS dan SPA-FS adalah untuk memastikan keamanan pangan jangka panjang dan nutrisi, untuk meningkatkan mata pencaharian petani di kawasan ASEAN. SPA-FS harus menciptakan 4 lingkungan yang menguntungkan, di mana AMS (*ASEAN Member States*) dapat mengintegrasikan, beroperasi dan bekerja sama dalam berbagai aspek yang terkait dengan produksi pangan, pengolahan dan perdagangan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. No 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang di makan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu. Konsumsi pangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologi, psikologi, maupun sosial. Pola konsumsi pangan merupakan susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pola konsumsi pangan di Indonesia masih belum sesuai dengan pola pangan ideal.

Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam mempunyai potensi dan peluang sangat besar untuk mengembangkan diversifikasi pangan. Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan teknologi informasi serta strategi komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mencapai status gizi yang baik. Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran gizi. Meningkatnya pembinaan, penanganan dan pengawasan pada pelaku usaha di bidang pangan diharapkan dapat meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Dari data yang bersumber dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tersebut, permasalahan pangan saat ini menjadi perhatian bagi semua pihak. Hal ini menjadi isu lintas sektor dan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi sektor kesehatan non-publik (pertanian, perindustrian, perdagangan, lingkungan, serta pariwisata). Permasalahan keamanan pangan menjadi salah satu fokus Badan POM di tahun 2014. Badan POM telah melakukan beberapa kajian terkait keamanan pangan yang diharapkan mampu meningkatkan keamanan pangan Indonesia. Permasalahan keamanan pangan, bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, melainkan juga para pelaku usaha dan peran serta dari masyarakat.

Pemerintah mempunyai tugas pokok untuk mengendalikan komoditas pangan dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Kenaikan dan gejolak harga yang terjadi pada komoditas pangan akan menurunkan kesejahteraan rakyat, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah dan juga memicu kenaikan laju inflasi. Beras merupakan komoditas pangan utama masyarakat Indonesia sementara cabai dan bawang merah adalah kelompok bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengolah makanan. Gejolak harga yang terjadi pada ketiga komoditas ini akan berdampak kepada masyarakat luas selaku konsumen dan juga para petani selaku produsen komoditas tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan intervensi untuk menstabilkan harga di pasar. Untuk bisa terlepas dari ketergantungan impor maka perlu suatu strategi tentang perencanaan produksi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kondisi geografi.

Sebelumnya badan urusan logistik nasional tugasnya adalah menangani sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat, yakni beras/sagu/jagung, gula pasir, sayur-sayuran dan buah-buahan, daging sapi, ayam, dan ikan, minyak goreng dan margarin, susu, telur, minyak tanah atau gas elpiji, serta garam beriodium dan bernatrium. Lewat Bulog itulah Soeharto relatif bisa mengendalikan harga-harga pangan yang dibutuhkan masyarakat selama Orde Baru. Selama itu pula stabilitas politik di Indonesia terjaga dan pertumbuhan ekonomi melesat, sebelum akhirnya marak adanya korupsi, kolusi, oleh nepotisme menjelang krisis moneter. Oleh karena itu, perdagangan pangan di Indonesia harus direformasi total agar efisien dan didukung sistem dan kelembagaan negara yang kuat. Meski pemerintahan nantinya datang silih berganti, sasaran tetap harus jelas dengan visi jangka panjangnya, yakni terciptanya stabilitas pasokan dan harga pangan yang wajar dalam jangka panjang, minimal 10 tahun ke depan.

Stabilisasi pasokan dan harga pangan ini sangat penting karena menjadi kunci menekan laju inflasi, agar daya beli masyarakat

meningkat dan suku bunga kredit perbankan terdorong turun. Dengan demikian, dunia usaha bisa meningkatkan ekspansi, untuk menggerakkan kembali roda ekonomi yang tengah lesu. Selain itu, stabilitas politik di Tanah Air bisa terjaga, sehingga investor tak ragu untuk mengeluarkan dananya.

Fungsi Bulog ini tidak lagi dibatasi untuk mengelola manajemen stok dan stabilisasi beras, namun juga ke sejumlah komoditas seperti gula, daging sapi, ayam, telur, ikan, cabai, kedelai, bawang putih, bawang merah, hingga sayur-mayur. Komoditas-komoditas pangan tersebut selama ini menyumbang inflasi cukup besar, sehingga menjadi penyebab tingginya inflasi di Tanah Air yang sulit diatasi. Dari sisi distribusi, Bulog tentunya harus dibantu koperasi-koperasi yang sudah diperkuat kelembagaan dan permodalannya, baik koperasi petani di sisi produsen maupun koperasi pedagang pasar di sisi saluran distribusi. Di masa lalu, Bulog sebenarnya sudah terbukti mampu membangun jaringan pemasaran yang efisien dan efektif, tanpa adanya sejumlah kasus penyelewengan lebih oleh oknum pejabatnya.

Pasar-pasar baru harus dibangun di lokasi dekat pusat-pusat pemukiman. Penataannya juga harus cukup bersih, mudah dijangkau dari mana-mana, dan modern. Selain dilengkapi tempat parkir yang tidak memakan badan jalan, pasar baru tersebut wajib dilengkapi jaringan teknologi komunikasi terkini, untuk mempermudah informasi pasokan dan harga maupun koordinasi. Dengan demikian, perkembangan pasokan dan harga di seluruh Indonesia bisa dipantau. Daerah-daerah penghasil pangan pun bisa menyalurkan panennya ke wilayah yang kekurangan. Di sisi lain, dengan penguasaan stok cukup dan jaringan distribusi hingga ke daerah, Bulog pun akan efektif melaksanakan operasi pasar (OP) saat harga barang tinggi. Demikian pula sebaliknya, Bulog mampu membeli panen dengan harga menguntungkan bagi produsen atau petani.

Pemerintah disarankan untuk mengurangi kebijakan impor pangan kendati kebijakan itu diambil untuk meningkatkan ketersediaan pangan. Pasalnya, kebijakan impor pangan dinilai lebih berpihak kepada pengusaha dan importir dibanding pada petani. Sehingga diperlukan upaya peningkatan luasan lahan pangan dan pengembangan industri hulu dan industri hilir pertanian. Ketersediaan pangan di masyarakat didominasi pangan impor. Oleh karena itu kedaulatan dan kemandirian pangan belum ditegakkan. Hal ini disebabkan komitmen pemerintah untuk menegakkan kedaulatan pangan dirasakan masih sangat minim.

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai tantangan untuk dapat mendistribusikan bahan pangan secara tepat waktu sehingga tersedia dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan tersedia setiap saat. Khusus untuk wilayah Indonesia

bagian timur, kepulauan terpencil dan daerah perbatasan tantangan yang dihadapi adalah iklim yang kurang mendukung, terbatas sarana/prasarana yang memadai untuk transportasi, pasar dan sarana penyimpanan, dan informasi pasar.

Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Masih adanya penduduk miskin, daerah rawan pangan, produksi pangan dihasilkan tidak merata antar wilayah dan sepanjang waktu, potensi SDA yang berbeda di masing-masing daerah akan berpengaruh terhadap distribusi dan pasokan bahan pangan. Kondisi ini, pada akhirnya akses pangan bagi setiap individu rumah tangga akan semakin menjadi rendah apabila ketersediaan pangan setempat terbatas, pasar tidak tersedia, transportasi terbatas, pendapatan rendah, pendidikan terbatas, pengangguran tinggi, budaya setempat belum memadai. Oleh sebab itu, peranan distribusi pangan yang terjangkau dan merata sepanjang waktu kiranya akan berpengaruh terhadap peningkatan akses pangan bagi setiap rumah tangga di dalam memenuhi kecukupan pangannya.

Distribusi pangan merupakan salah satu subsistem ketahanan pangan yang peranannya sangat strategis, apabila tidak dapat terselenggara secara baik dan lancar, bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat tidak akan terpenuhi. Distribusi pangan ini diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan merata di setiap lokasi berlangsungnya transaksi bahan pangan kebutuhan masyarakat. Gangguan distribusi pangan ini berdampak terhadap kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga pangan serta berpengaruh terhadap rendahnya akses pangan masyarakat karena daya beli bahan pangan menjadi menurun.

Mengenai kualitas makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengakui bahwa memang harus diperlukan pembicaraan bersama antara pengusaha makanan dan pengusaha penunjang bahan baku makanan dengan pemerintah. Selain itu, lembaga negara tersebut menyadari harus memberikan lebih banyak edukasi pada pengusaha kelas menengah ke bawah agar memanfaatkan bahan penunjang makanan yang aman untuk dikonsumsi. Ragam makanan di Indonesia sangat banyak, maka masyarakat harus benar-benar selektif dalam mengolah maupun mengkonsumsi makanan bentuk instan. Masyarakat Indonesia krang begitu memahami bahwa cermin mutu gizi di suatu negara ditentukan oleh konsumsi buah dan sayur. Jika melihat budaya masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi makanan sangat jelas terlihat terutama di kalangan remaja yaitu kurangnya konsumsi buah dan sayur yang dapat menyebabkan tingginya tingkat obesitas di Indonesia.

Budaya pola makan yang baik memang perlu diterapkan oleh masyarakat Indonesia dengan cara mengonsumsi buah dan sayur secara rutin, terutama iklim di Indonesia adalah iklim tropis dimana kondisi tubuh sangat memerlukan asupan gizi dan nutrisi yang cukup. Kecenderungan masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi makanan instan juga perlu dirubah. Semakin berkembangnya jaman, budaya mengonsumsi instan atau siap saji menjadi suatu trend. Padahal kebiasaan tersebut harus dihilangkan, karena tidak semua makanan siap saji atau instan itu tidak memiliki dampak pada tubuh. Berbeda dengan kebiasaan orang-orang jaman dahulu dalam mengonsumsi makanan secara alami seperti mengonsumsi umbi-umbian yang hanya direbus bahkan apabila membuat suatu hidangan, orang-orang jaman dahulu tidak maksimal dalam penggunaan bumbu masak.

Perlunya sikap tegas pemerintah, terutama kepada para produsen pangan harus lebih digiatkan. Jika pemerintah membiarkan kondisi seperti saat ini terus terjadi, dimana tingkat kualitas pangan di Indonesia semakin memburuk maka akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Penerapan gizi empat sehat lima sempurna pun seakan terlupakan karena tergeser dengan budaya makanan instan yang semakin berkembang. Padahal jika dilihat dari pemenuhan untuk mencapai makanan empat sehat lima sempurna, di Indonesia tidak lah susah ataupun mahal. Cukup dengan mengurangi makanan instan dan secara perlahan menerapkan pola makan empat sehat lima sempurna secara teratur.

Isu pemanasan global turut mempengaruhi pembangunan bidang pertanian yang pada umumnya memiliki karakteristik pertanian berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat produktivitas dan mutu produk yang rendah dan beragam. Dampak pemanasan global ialah berubahnya iklim, yaitu perubahan curah hujan serta naiknya intensitas dan frekuensi badai. Permukaan laut akan naik, sebagian Karena memuainya air laut pada suhu yang lebih tinggi sehingga volumenya naik, sebagian lagi karena melelehnya es abadi di punggungan tinggi dan di kutub. Pemanasan global ada juga dampak positifnya, seperti meluasnya daerah pertanian ke daerah yang lebih dingin, misalnya di Amerika Utara, dan dipicunya pertumbuhan tanaman oleh naiknya kadar CO².

Walaupun pemanasan global memiliki dampak positif, tetapi secara keseluruhan pemanasan global akan memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan manusia, termasuk terhadap pembangunan di bidang pertanian di Indonesia. Seperti yang tengah dialami bangsa Indonesia dewasa ini, perubahan iklim telah mengakibatkan tidak menentunya siklus perubahan musim. Kondisi itu diperparah dengan meningkatnya curah hujan di sebagian daerah dengan kurun waktu lebih

lama dari biasanya, di pihak lain, kemarau panjang juga terjadi di sebagian daerah. Secara keseluruhan hal tersebut dapat memberikan dampak negatif pada pembangunan bidang pertanian, sehingga intensifikasi produksi pertanian dalam perspektif ketahanan nasional pun harus memperhatikan perkembangan tersebut.

Karena kondisi cuaca maupun iklim di Indonesia yang selalu berubah seperti halnya terjadi kemarau berkepanjangan dapat memberikan dampak buruk bagi pertanian Indonesia, dimana tanaman pangan banyak yang mati karena kekeringan sehingga produksi pangan menjadi terhambat. Untuk mengantisipasi terjadinya musim kemarau yang terjadi secara berkepanjangan, sebaiknya sebelum musim kemarau datang, seperti lumbung-lumbung padi contohnya, harus diisi cadangan beras yang cukup jika musim kemarau terjadi dan berlangsung lama.

Dampak perubahan iklim mempengaruhi beberapa sektor ekonomi masyarakat, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kurangnya cadangan air. Terlambatnya musim hujan dan naiknya intensitas hujan, membawa kerugian cukup besar bagi masyarakat. Salah satu sektor yang paling terpengaruh dengan perubahan iklim adalah sektor pertanian. Pertama, perubahan iklim akan berdampak pada pergeseran musim, yakni semakin singkatnya musim hujan namun dengan curah hujan yang lebih besar. Kerusakan tanaman terjadi karena intensitas curah hujan yang tinggi yang berdampak pada banjir dan tanah longsor serta angin. Kedua, fluktuasi suhu dan kelembapan udara yang semakin meningkat yang mampu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan organisme pengganggu tanaman. Ketiga, menurunnya kesejahteraan ekonomi petani. Dua hal di atas sangat jelas merugikan petani dan sektor pertanian karena akan semakin menurunkan hasil pertanian yang berpengaruh pada menurunnya pendapatan petani. Sebab perekonomian petani bergantung pada keberhasilan panen, jika terjadi kegagalan panen, maka petani akan mengalami kerugian.

Komunitas global telah memahami bahwa kondisi pangan di banyak negara saat ini, kritis dan mengkhawatirkan, sehingga berbagai upaya dan kebijakan sudah mulai dilakukan. Kekhawatiran yang bermula dari wacana telah ditanggapi oleh masyarakat Internasional dengan mengambil langkah kebijakan kolektif bersama untuk mengurangi kekurangan akses pangan dari golongan masyarakat bawah. Krisis pangan ini diperparah dengan krisis energi yang menyebabkan sektor industri dan ekonomi menurun. Kondisi tersebut mengakibatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat. Hal ini merupakan fenomena sebab-akibat yang saling berhubungan satu sama lain.

Sistem pangan dunia sebagian bersifat eksklusif. Setiap negara melakukan kebijakan khusus untuk mempertahankan status ketahanan pangan yang optimal. Sumber daya ekonomi, subsidi, kebijakan, dan

lainnya dikerahkan untuk mempertahankan sistem pangan nasional masing-masing secara optimal karena ketahanan pangan berpengaruh langsung terhadap ketahanan sosial dan politik di negara tersebut. Pada kasus beras, negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, China, dan sebagainya melakukan kebijakan Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia 5 produksi untuk mempertahankan sistem pangan nasional masing-masing. Jika ada surplus, sisa tersebut dilempar ke pasar Internasional sebagai bagian dari perdagangan sisa. Jika harga pasar baik, negara tersebut akan mendapatkan tambahan devisa.

Dalam mengadopsi kerangka kerjasama nomer satu yang terdapat dalam AIFS, Indonesia harus mampu meningkatkan ketersediaan pangan dalam negeri apabila ingin mewujudkan ketahanan domestik. Ketersediaan pangan domestik akan terus meningkat dengan baik apabila seluruh bahan-bahan pokok pangan tersedia melimpah. Untuk melakukan penguatan bahan pokok pertanian, pemerintah memiliki peran penting di dalamnya sebagai pembuat kebijakan agar produktifitas bahan pokok pangan terus menunjukkan adanya peningkatan. Ketersediaan pangan merupakan kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kabupaten dan tingkat masyarakat. Bahan pangan pokok masyarakat Indonesia yaitu beras dan bahan pangan alternatif pengganti beras yang dikonsumsi masyarakat Indonesia pada umumnya adalah jagung.

Beras merupakan bahan makanan pokok yang menjadi konsumsi bagi sebagian besar penduduk di Indonesia. Preferensi masyarakat terhadap beras semakin besar. Berdasarkan data SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi Nasional) 1990-1999, tingkat partisipasi konsumsi beras di setiap provinsi maupun tingkatan pendapatan mencapai sekitar 97-100%. Ini artinya hanya sekitar 3% rumah tangga yang tidak mengkonsumsi beras sebagai pangan pokok terutama pangan pokok tunggal. Tingkat partisipasi konsumsi beras yang lebih kecil 90% hanya ditemukan di pedesaan Papua. Sebagai gambaran, tingkat konsumsi beras rata-rata di kota tahun 1999 adalah 96,0 kg per kapita per tahun dan didesa adalah 111,8 kg per kapita/tahun (Suharno, 2005).

Peningkatan produksi beras sebanyak dua juta ton di setiap tahun nya mempunyai makna bahwa produksi padi tahun 2007 harus meningkat sebanyak 5,6% terhadap produksi tahun 2006 yaitu 54,66 juta ton atau setara dengan 33,53 juta ton beras. Target kenaikan produksi beras sebanyak dua juta ton merupakan target yang sangat tinggi karena pertumbuhan produksi tertinggi yang pernah dicapai (1980-1990) hanya sebesar 4,34%. Hal penting yang perlu digaris bawahi

adalah bahwa peningkatan produksi beras sebaiknya dapat memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani produsen. Selama ini kesejahteraan petani cenderung menurun sebagaimana diindikasikan dengan penurunan nilai tukar petani. Nilai tukar pada bulan Agustus 2006 turun 0,53% dari 103,15 dalam bulan Juli 2006 menjadi 102,6 dalam bulan Agustus 2006 (BPS, 2006).

Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting, selain gandum dan padi. Jagung termasuk komoditas strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian Indonesia. Dengan jumlah produksi yang terus meningkat setiap tahunnya, produksi jagung dalam negeri tahun 2006 mencapai 11.61 juta ton (Badan Pusat Statistik, 2006).

Buku

Anthony L. Smith. (2001). *Indonesia: Transforming the Leviathan,*” dalam John Funston (ed), *Government and Politics in Southeast Asia*. Singapura: ISEAS.

Mingst, Karen. (1998). *Essentials Of International Relations*. New York: W.WNorton & Company.

Nursalam. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Artikel dan Jurnal, Koran, Majalah dan Data Online

Dewan Riset Nasional. *Diversifikasi Pangan Jurus Jitu Menuju Kemandirian Perbaikan Gizi Masyarakat Indonesia*.
<http://www.drn.go.id/index.php/en/8-berita-terkini/276-diversifikasi-pangan-jurus-jitu-menuju-kemandirian-pangan-perbaikan-gizi-masyarakat-indonesi>.

Kementerian Luar Negeri

<http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=9&l=id>

Krisis Pangan dan ancaman ASEAN Economic Community

http://www.kompasiana.com/sae/krisis-pangan-dan-ancaman-asean-economic-community-2015_552a4927f17e612f70d62502

Majalah ASEAN Edisi 3 “ Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 23 dan KTT Terkait lainnya” By Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
Kementerian Luar Negeri RI

FAO (*Food and Agriculture Organization*) <http://www.fao.org/about/en/>

Petik Dua, “Analisis Teori dan Konsep Ketahanan Pangan dan Keterkaitannya terhadap Krisis Pangan Global dalam Ilmu Hubungan Internasional”, diakses dari <https://petikdua.wordpress.com/2011/08/23/analisis-teori-dan-konsep-ketahanan-pangan-dan-keterkaitannya-terhadap-krisis-pangan-global-dalam-ilmu-hubungan-internasional/>

Indonesia Butuh Strategi Revolusioner Untuk Ketahanan Pangan

http://www.kompasiana.com/www.aepsaefullah.blogspot.com/indonesia-butuh-strategi-revolusioner-untuk-ketahanan-pangan_5508f85e813311791cb1e34d Diakses 7 Agustus 2015

World Food Programme

home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp276257.pdf

Kerangka Kerja Sama AIFS

<http://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/2009%20AIFS.pdf>

Buku Informasi Umum: Masyarakat Ekonomi ASEAN pdf

Badan Usaha Logistik. Ketahanan Pangan di Indonesia

<http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php>

Keamanan Pangan Tanggung Jawab Bersama

<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/261/---KEAMANAN-PANGAN-TANGGUNG-JAWAB-BERSAMA---.html>

Stabilisasi Harga Pangan

<http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/4232-stabilisasi-harga-pangan.html>

Univeritas Gadjah Mada. Ketersediaan Pangan Nasional Di Dominasi Pangan Impor

<http://www.ugm.ac.id/id/berita/7975-ketersediaan.pangan.nasional.didominasi.pangan.impor>

World Food Programme. Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Indonesia 2015. Wfp.org.go.id

Kedaulatan Pangan. Swasembada Pangan di Era SBY

<http://kedaulatanpangan.net/2015/04/swasembada-pangan-di-era-sby/>

CNN Indonesia. Kekeringan Ancaman Pasokan Pangan.

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150810104846-92-71060/kekeringan-ancam-pasokan-pangan-mendag-wacanakan-impor-beras/>

Badan Usaha Logistik. Peningkatan produktifitas beras sebagai bahan pokok.

www.bulog.go.id

Sekretaris Kabinet. Posisi Pertanian Indonesia.

<http://setkab.go.id/posisi-pertanian-yang-tetap-strategis-masa-kini-dan-masa-depan/>

Portal Garuda. Ketahanan Pangan Indonesia. **Error! Hyperlink reference not valid.**

Kementerian Perindustrian. Perkembangan Perundingan WTO di Jenewa
Khususnya Sektor Pertanian Jasa

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/592/Perkembangan-Perundingan-WTO-Di-Jenawa,-Khususnya-Sektor-Pertanian,Jasa---Jasa-Dan-Haikiki-yang-Menyangkut-Kesehatan-Masyarakat>